

Judul : Rentetan Kejanggalan dalam Skandal Kluster Mewah Lapas Cibinong
Tanggal : Rabu, 30 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

PEMASYARAKATAN

Rentetan Kejanggalan dalam Skandal Kluster Mewah Lapas Cibinong

Hidayat Salam

Penjelasan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terkait temuan kluster mewah di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, belum sepenuhnya menjawab pertanyaan publik. Sejumlah fakta baru yang terungkap justru menambah tanda tanya mengenai hunian itu dan penggunaannya.

Kejanggalan sebenarnya sudah tampak saat Ombudsman RI inspeksi mendadak (sidak) ke Lapas Cibinong. Pada sidak pertama, 26 Juli 2026, pihak Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Cibinong menolak tim Ombudsman masuk. Namun, Ombudsman tak surut. Dua bulan kemudian, persisnya pada 23 September lalu, tim Ombudsman kembali sidak ke Lapas Cibinong.

Sidak tak berlangsung mulus. Tim dicegah masuk melihat ke area lapas. Bahkan, terjadi adu mulut dan saling dorong di antara petugas lapas dan personel Ombudsman. Kukuhnya petugas lapas menolak sidak membuat personel Ombudsman semakin penasar hingga akhirnya, mereka bisa meneras halangan petugas dan menemukan sejumlah bangunan berfasilitas mewah.

Ada sekitar 10 rumah di area itu yang dilengkapi dengan sofa, kulkas, televisi, kamar berpenyejuk ruangan, dan meja makan. Di dalam kulkas juga ditemukan minuman beralkohol. Tak jauh dari situ, dijumpai area parkir mobil-mobil mewah.

Wisnu Hani Putranto, yang telah dinonaktifkan sebagai Kepala Lapas Cibinong sebagai buntut dari sidak itu, saat rapat dengan Komisi XIII DPR, Senin (28/9/2026), beralasan, saat tim Ombudsman datang, di lapas tengah berlangsung kegiatan kunjungan keluarga warga binaan. Tim Ombudsman tidak bisa langsung masuk ke dalam karena seluruh warga binaan sedang berkegiatan di area luar kamar atau blok hunian.

Namun, dalam rapat dengan Komisi XIII itu terungkap pula bahwa di lokasi tersebut terdapat 16 bangunan. Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) Lapas Cibinong nonaktif Deni Sugarto mengungkapkan, hunian itu dibangun bertahap sejak tahun 2021 hingga 2025. Kendati menyebut bahwa rumah-rumah itu dibangun secara swakelola, ia mengaku tak mengetahui sumber dananya.

Bukan hanya itu, dalam rapat dengan Komisi XIII DPR itu juga terungkap, hanya tiga

bangunan yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN). Sementara 13 bangunan yang berada di bantaran Sungai Cilirung justru tidak tercatat dalam Simak BMN.

Foto napi koruptor

Dukan hanya menemukan hunian dengan fasilitas mewah, dalam sidak, Ombudsman juga menemukan foto yang diduga Jimmy Masrin. Foto itu tergeletak di atas meja salah satu rumah berfasilitas mewah. Ketika itu, tim Ombudsman juga menjumpai seseorang menutup pintu kamar dan menguncinya.

Namun, Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipras) Mashudi berkilah bahwa hingga foto itu adalah barang hasil razia oleh petugas lapas. Mashudi juga tidak mengungkapkan apakah Jimmy juga orang yang tengah bersembunyi di dalam kamar tersebut.

Ombudsman juga menemukan warga binaan tengah di kluster mewah Lapas Cibinong. Dalam rapat yang digelar Komisi XIII DPR baru terungkap bahwa dua warga binaan itu adalah Ahmad Alhani dan Hasan Tjhi. Keduanya

KPK atau Kejaksaan Agung atau kepolisian itu harus menangani karena ini ada dugaan korupsi.

Boyamin Saman

merupakan narapidana perkara korupsi PT Timah.

Ahmad Alhani telah divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, tetapi kemudian diperberat menjadi 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada Februari 2025.

Adapun Hasan Tjhi mulanya divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, tetapi kemudian diperberat menjadi 10 tahun penjara oleh hakim pengadilan banding.

Saat dikonfirmasi, Mashudi menegaskan bahwa ruangan itu merupakan area sarana asilasi dan edukasi. Ia tidak mengungkapkan alasan Ahmad Alhani dan Hasan Tjhi berada di ruangan karena masih menunggu hasil investigasi.

Sementara itu, sejumlah fakta baru yang terungkap dalam rapat Komisi XIII DPR

justru memperkuat asumsi publik mengenai adanya penyalahgunaan dalam pengelolaan lapas. Salah satunya fakta soal kawasan hunian itu tidak dilengkapi kamera pemantau (CCTV) karena bukan merupakan blok hunian narapidana resmi.

Klaim tidak adanya CCTV justru berbanding terbalik dengan penelusuran warganet dari rekaman video Ombudsman RI, yang memperlihatkan keberadaan unit CCTV terpasang di sejumlah sudut bangunan.

Kecurigaan juga timbul karena ada upaya sistematis untuk menghilangkan jejak fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Hanya berselang beberapa hari setelah sidak Ombudsman RI, fasilitas di kawasan hunian mewah itu mendadak hilang. Sejumlah fasilitas dan barang yang terekam dalam video sidak Ombudsman, seperti kulkas, perangkat televisi, peralatan kebugaran, simulator, dan botol minuman keras, telah hilang atau berpindah tempat.

Dalam rapat di Komisi XIII DPR, Mashudi mengungkapkan, televisi, sofa, *springbed*, dan kulkas di Lapas Cibinong merupakan barang pribadi milik Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib). Kasi Kamtib menempati rumah di-

nas tempat barang-barang dan minuman beralkohol itu ditemukan.

Usut dugaan korupsi

Dengan berbagai kejanggalan dalam skandal hunian mewah di Lapas Cibinong itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak aparat penegak hukum, seperti KPK dan Kejaksaan Agung, untuk proaktif mengusut dugaan korupsi. Penyelidikan kasus korupsi dibutuhkan untuk membongkar jejaring internal lapas yang memfasilitasi hunian mewah bagi narapidana kaya tersebut.

"KPK atau Kejaksaan Agung atau kepolisian itu harus menangani karena ini ada dugaan korupsi, pungutan liar, setoran-setoran, *gitu*. Karena *tidak* mungkin ada fasilitas-fasilitas itu kalau tidak ada setoran—dugaan setoran atau dugaan pungutan liar," ujarnya.

Boyamin berpandangan, pemberian fasilitas khusus kepada warga binaan tidak hanya mencederai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga melumpuhkan fungsi pemidanaan sebagai sarana efek jera (*deterrent effect*). Kasus di Lapas Cibinong harus menjadi momentum pembersihan total biro-

krasi pemasarakatan di Indonesia.

Pengajar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menambahkan, fasilitas lengkap menyerupai hunian pribadi atau apartemen juga mustahil diperoleh cuma-cuma tanpa adanya transaksi finansial di bawah meja.

"Karena itu, selain diberhentikan dari jabatannya juga harus diteruskan penuntutannya ke ranah pidana. Mereka memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri," ujar Fickar.

Ketua KPK Setyo Budiyo telah mengungkapkan, pihaknya mencermati skandal fasilitas mewah di Lapas Cibinong. "Terbuka untuk berkoordinasi dengan ORI (Ombudsman RI) dan Kementerian Imipras (Imigrasi dan Pemasarakatan)," ujarnya.

Sementara itu, pemeriksaan oleh tim internal Kementerian Imipras masih terus berlangsung. Mashudi menjanjikan hasil investigasi dapat disampaikan kepada publik pada Kamis (1/10) besok.

Untuk kepentingan pemeriksaan, Mashudi juga telah meminta Kepala Lapas Cibinong untuk mengembalikan kondisi dan barang-barang di rumah, seperti saat Ombudsman melakukan sidak.